

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

* **Muhamad Hanafi¹, Nina Yuslaini²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muhammadhanafihanafi387@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait lokasi lokasi wisata yang menarik bagi wisatawan, termasuk mata air panas alami di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Kuantan Hulu, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait objek wisata tersebut di wilayah yang sama. Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan lokasi wisata dengan mata air panas alami belum seefektif yang diharapkan. Sumber daya yang tersedia bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terutama yang dialokasikan untuk divisi pariwisata, belum ideal karena anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan pariwisata terbatas, yang berdampak pada ketersediaan amenities dan infrastruktur di lokasi-lokasi mata air panas. Kurangnya kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan, menyebabkan minimnya ketersediaan tempat menginap bagi wisatawan dari luar Kabupaten Kuantan Singingi. Struktur birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sebaik yang diharapkan karena belum adanya aturan atau pedoman baku (SOP) yang mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan di pemandian air panas, dan belum tersedianya rambu-rambu informasi yang memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa hal ini cukup terlihat jelas dalam operasional pemerintahan yang seringkali kurang diperhatikan, sehingga menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan destinasi wisata yang berpusat di sekitar pemandian air panas alami. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, wisata pemandian air panas, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai metrik, memerlukan kerja sama antara pemangku kebijakan (pemangku kepentingan), pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan.

Kata Kunci: Pariwisata, Pemandian Air Panas, Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat, Kerja Sama

Abstract

This study aims to determine the approach of the Tourism and Culture Office regarding attractive tourist locations, including natural hot springs in Sungai Pinang Village, Kuantan Hulu Regency, while also identifying factors that hinder the implementation of the Tourism and Culture Office's strategy regarding these tourist attractions in the same area. Qualitative methodology was used in this study. The results of this study indicate that the delivery of information in the implementation of policies to improve tourist locations with natural hot springs has not been as effective as expected. The resources available to the Tourism and Culture Office, especially those allocated to the tourism division, are not ideal due to the limited budget allocated by the government for tourism development, which impacts the availability of amenities and infrastructure at hot spring locations. The lack of partnership between the government and business actors, especially in the hotel sector, results in a limited availability of accommodations for tourists from outside Kuantan Singingi Regency. The bureaucratic structure of the Tourism and Culture Office is not as good as expected due to the lack of regulations or standard guidelines (SOPs) governing the procedures for organizing activities at hot springs, and the lack of adequate information signs. This study concludes that this is quite evident in government operations, which often lack attention, resulting in less than optimal growth of tourist destinations centered around natural hot springs. To achieve the desired results, hot spring tourism, as demonstrated by various metrics, requires collaboration between policymakers (stakeholders), policy implementers, and policy monitors.

Keywords: Tourism, Hot Springs, Policy Implementation, Inhibiting Factors, Cooperation

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia terbukti telah membuktikan signifikansinya dalam memperkuat perekonomian, dinamika masyarakat, dan tatanan budaya bangsa. Target industri pariwisata pada tahun 2017 adalah menghasilkan pendapatan sebesar 260 triliun rupiah dari wisatawan mancanegara. Industri pariwisata pada tahun 2017 secara konsisten menjadi fokus utama, khususnya peningkatan pariwisata Indonesia melalui inisiatif "Wonderful Indonesia".

Permasalahan yang menjadi dasar studi ini diuraikan di bawah ini.

1. Kondisi lokasi wisata saat ini sebagian besar tidak jelas, mengingat statusnya
2. sebelumnya sebagai destinasi wisata. Jalur yang menghubungkan Desa Saik ke mata air panas bumi telah tertutupi seluruhnya oleh vegetasi, hanya menyisakan jalur pejalan kaki yang sempit. Kondisi infrastruktur juga sangat memprihatinkan; telah tertutupi oleh tumbuhan, sehingga mengaburkan fitur-fitur struktural dari pandangan mata.
3. Kondisi mata air panas bumi yang tidak terawat dan tidak higienis membuat orang enggan berendam, meskipun banyak yang percaya bahwa mata air panas bumi dapat meredakan iritasi kulit. Meskipun banyak orang ingin mengunjungi mata air panas, akses jalan yang sulit membuat orang enggan untuk berendam.

Berita sebelumnya menunjukkan kemungkinan kurangnya komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menegakkan peraturan yang telah ditetapkan, yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan tahunan secara konsisten di destinasi tersebut. Di Kabupaten Kuantan Singingi, bidang konsentrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, yang berkaitan dengan Sektor Destinasi Pariwisata dan mewajibkan Dinas untuk membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, serta mengoordinasikan, mendukung, melatih, mengawasi, menilai, dan memberikan laporan di Sektor Destinasi Pariwisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya investigasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Metodologi ini menggunakan strategi kualitatif deskriptif, dengan perspektif yuridis sosiologis, yang melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Sudut pandang sosiologis ini memandang dan membingkai hukum sebagai komponen konkret dan operasional dari kerangka sosial yang ada di dalam masyarakat (Ningsih, 2020:43).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Berdasarkan wawancara mengenai Indikator Komunikasi yang diterapkan untuk mempromosikan wisata pemandian air panas, poin-poin berikut disampaikan: Daerah kami memiliki potensi pariwisata yang substansial, meliputi aspek religi, budaya, dan alam. Namun demikian, kegiatan yang paling menonjol di Kabupaten Kuantan Singingi adalah wisata pemandian air panas, yang telah ditampilkan dalam jadwal pariwisata pada beberapa kesempatan, tetapi saat ini dihentikan. Oleh karena itu, kami memerlukan wawasan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan pelaku industri pariwisata di Riau untuk memastikan bahwa masing-masing objek wisata ini dapat merangsang

kunjungan wisatawan ke wilayah kami, terutama dalam pengelolaan pemandian air panas, dengan harapan bahwa kualitas layanan dan kemampuan individu yang bekerja di bidang pariwisata juga dapat ditingkatkan.

Berdasarkan data yang disajikan, kerja sama dengan organisasi yang terkait dengan mata air panas bumi membutuhkan partisipasi dari pemerintah kota, termasuk dinas pariwisata, lingkungan hidup, dan kesehatan, untuk mengurus perizinan dan pedoman keselamatan. Hal ini juga memerlukan keterlibatan dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) atau Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung untuk isu-isu terkait pelestarian sumber daya air. Lebih lanjut, entitas swasta seperti operator objek wisata berperan penting bagi operasional dan pertumbuhan jangka panjang.

2. Sumber Daya

Rincian selanjutnya menjelaskan umpan balik masyarakat terkait indikator sumber daya, yang memberikan wawasan tambahan tentang sumber daya untuk kemajuan wisata mata air panas. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu Weni, yang memegang posisi kepemimpinan di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Saya yakin bahwa pemerintah secara konsisten meningkatkan efektivitasnya, terutama di bidang teknologi. Kemahiran teknologi tidak dapat disangkal sangat penting dalam lanskap global yang maju saat ini, mengingat berita dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu mengikuti perkembangan inovasi teknologi terbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam meningkatkan sumber air panas yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kuantan Mudik, dinilai kurang ideal. Hal ini terutama disebabkan oleh pengelolaan pariwisata yang kurang efektif, terutama belum adanya nota kesepahaman (MoU) dengan desa terkait pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pembangunan sarana fisik seperti kolam dan pagar pengaman telah dilaksanakan pada tahun 2020 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), potensi sumber air panas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Disposisi

Konten selanjutnya merinci bagaimana masyarakat umum bereaksi terhadap indikator-indikator tersebut. Ibu Weni, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, dalam sebuah wawancara menyebutkan, "Mengenai kolaborasi dengan pihak berwenang, menurut saya pemerintah benar-benar bekerja sama dengan instansi terkait. Karena ini merupakan acara yang cukup penting, tentu saja banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraannya untuk memastikan kelancaran acara tersebut."

Berdasarkan data penelitian, Dinas Pariwisata mengelola sumber air panas dengan berfokus pada perencanaan masa depan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan layanan dan keterampilan staf, kerja sama dengan berbagai pihak, serta promosi destinasi dengan citra yang unik. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan potensi pariwisata, mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi daerah, dan melindungi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat lokal dan pelaku bisnis pariwisata lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Sementara itu, Bapak Elvis, S.Pd., yang bertanggung jawab atas divisi pemasaran ekonomi kreatif, menyebutkan bahwa kami senantiasa memenuhi tanggung jawab kami dengan mengikuti Peran dan Fungsi yang telah ditetapkan. Mengenai Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolaan sumber air panas, saat ini belum tersedia, mengingat hal ini merupakan tradisi tahunan yang telah dipraktikkan selama lebih dari seratus tahun, yang memastikan bahwa setiap orang memahami setiap langkah yang terlibat dalam pelaksanaan operasional ini.

Dalam penerapan strategi pengembangan wisata pemandian air panas, belum ada Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas dan spesifik yang mengatur tempat wisata pemandian air panas, hanya mengacu pada tanggung jawab dan peran inti. Kajian terhadap SOP yang diterapkan dalam pengembangan wisata pemandian air panas menunjukkan inefisiensi yang berkelanjutan karena belum adanya sistem operasi yang baku dalam pengelolaan pemandian air panas. Hal ini menyebabkan perkembangan yang lambat, mengingat inisiatif pengembangan wisata yang lebih luas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pengembangan lokasi wisata, khususnya pemandian air panas, belum memiliki SOP yang mengaturnya, dan penerapannya sepenuhnya bergantung pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat tradisi penyelenggaraan acara pemandian air panas yang sudah mapan, beberapa di antaranya berlangsung selama beberapa tahun, dan belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur pelaksanaannya, maka direkomendasikan agar pemerintah daerah merumuskan peraturan khusus yang ditujukan untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan acara pemandian air panas ini.

Dibutuhkan banyak entitas yang bekerja sama untuk mengelola pariwisata, alih-alih hanya satu organisasi. Untuk membangkitkan minat mereka yang tidak tinggal di sini untuk merasakan tradisi budaya lama kami, yang telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun, kami sering menyelenggarakan pameran di setiap pertemuan, baik yang berada di wilayah kami maupun di tempat lain.

Menurut informan sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi secara konsisten bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan acara-acara terkait pariwisata. Hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata tidak mungkin menangani setiap acara sendirian; kegiatan-kegiatan ini juga mutlak membutuhkan keterlibatan yang signifikan dari masyarakat setempat agar dapat terlaksana dengan sukses.

Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata pemandian air panas, belum terdapat Prosedur Operasi Standar (SOP) yang secara khusus mengatur destinasi wisata pemandian air panas, melainkan diarahkan oleh peran dan tanggung jawab utama. Penilaian peneliti menunjukkan bahwa SOP yang diterapkan dalam pengembangan wisata pemandian air panas masih belum efisien, disebabkan oleh belum adanya SOP yang spesifik dan dirancang khusus untuk pengelolaan pemandian air panas. Hal ini menyebabkan perkembangan yang terbatas, di mana skema pengembangan wisata secara keseluruhan sejalan dengan RPJMD, sementara pengembangan destinasi wisata khusus, khususnya pemandian air panas, belum memiliki SOP yang mengaturnya, dan

pelaksanaannya semata-mata berpedoman pada peran dan tanggung jawab utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, ajang wisata budaya pemandian air panas kurang melibatkan masyarakat dalam keberhasilannya, padahal kerja sama dengan pihak perhotelan dapat pula mendongkrak pendapatan daerah.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam studi kasus pemandian air panas belum ideal, berdasarkan temuan penelitian yang disajikan pada bab sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan birokrasi pemerintah yang seringkali kurang optimal, sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya wisata pemandian air panas. Pendekatan pengembangan pemandian air panas yang berbasis pada beberapa indikator membutuhkan kolaborasi antara pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengelola kebijakan (pemangku kepentingan) untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mewujudkan daya tarik wisata pemandian air panas, dilihat dari empat (4) indikatornya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karena keterbatasan metode promosi yang digunakan yang masih terbatas pada sektor domestik melalui spanduk dan baliho komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata pemandian air panas belum optimal. Terbatasnya investasi pemerintah dalam pengembangan objek wisata, terutama ketersediaan sarana dan prasarana di objek wisata pemandian air panas, menunjukkan bahwa sumber daya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya di sektor pariwisata, belum optimal. Selain itu, masih minimnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, terutama di industri perhotelan, yang mengakibatkan wisatawan di luar Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pilihan penginapan yang sangat terbatas. Karena keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemandian air panas masih rendah, dan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pemandian air panas ini meskipun merupakan kegiatan besar yang telah berlangsung selama berabad-abad mungkin dapat dikatakan bahwa sikap Pelaksana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum ideal. Struktur birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kemungkinan belum ideal karena belum adanya prosedur operasi standar yang mengatur penyelenggaraan kegiatan wisata pemandian air panas serta minimnya papan informasi yang dapat membantu wisatawan untuk berwisata di pemandian air panas.
2. Tantangan dalam studi ini meliputi terbatasnya dana untuk pengembangan lokasi wisata dan infrastruktur serta fasilitas pariwisata yang belum memadai. Mengingat popularitas acara ini yang luar biasa dan fakta bahwa ribuan orang hadir, lokasi yang dimanfaatkan belum memadai, dan infrastrukturnya masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan untuk menikmati pemandian air panas. Karena pemerintah kurang berupaya untuk melibatkan sektor komersial, terutama industri perhotelan, terdapat kelangkaan akomodasi wisata di luar Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

Ndraha. (2001). *Kybernologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Nina Y, M Fadhillah, Lintang N, A., Sri Maulidiah dan Demas F, W. (2024). *Strategi Promosi Objek Wisata Arung Sungai Kopu Berbasis Website Destinasi Wisata*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 8 No. (5). Hal 1346-1354.
- Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Berbunyi. Negara Indonesia Dibagi Atas Daerah-Daerah Provinsi Dan Daerah Provinsi Itu Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota.
- Peraturan Bupati Nomor. 34 Tahun 2016 Tentang Bidang Destinasi Pariwisata.
- Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, and Nuryah Asri Sjafriz. (2018). *Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung*. Jurnal Kajian Komunikasi 6, No. (178).
- Rahmayunir, R., Sri M., Nina, Y dan Muhammad Hafiz Rahmayunir. 2024. Evaluation Of Aid Task Implementation: Government Obstacles in Improving Agriculture in Rokan Hulu District, Riau Province. *Journal Infrastruktur, Policy and Development*. Vol (8). No. 9.
- Rasyid. (1996). *Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta.
- Siswanto. (2001). *Pedoman Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*. Diakses Pada 1 Desember, 2013 dari www.bkkbn.go.id.
- Soejono, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru)*. Rajawali Pers.
- Sondang, P. Siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Subejo dan Supriyanto. (2020). *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.
- Suharto dan Edi. (2000). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, R. S. (2004). *Dimensi-dimensi Pemberdayaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafie. (2016). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema. Insani : Jakarta. Strategy to Increase Shredded Patin Fish Production in The Mina Family Fish Farming Group Kandis District, Siak. *Journal Pengabdian Masyarakat*. Vol. (8). No. 9
- Syafie. (2016). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema. Insani : Jakarta. Strategy to Increase Shredded Patin Fish Production in The Mina Family Fish Farming Group Kandis District, Siak. *Journal Pengabdian Masyarakat*. Vol. (8). No. 9.
- Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Usaha Kepariwisata Jasa Pariwisata Objek Pengusahaan dan Daya Tarik Pariwisata.
- Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pada Bidang Destinasi Pariwisata.